

ABSTRAK

Dengan adanya jaminan dalam transaksi kredit antara kreditur dan debitur, maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan dalam benda bergerak adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana akibat hukum dari penjaminan BPKB ke Lembaga Pembiayaan Konsumen tanpa sepengetahuan si pemilik dihubungkan dengan Buku III KUHPerduta ? serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas benda akibat dari penjaminan fidusia secara melawan hukum ?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat). Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tahap penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kreditur dan debitur melakukan perjanjian untuk melakukan penjaminan fidusia dengan menjaminkan kendaraan milik orang lain tanpa sepengetahuan dan izin si pemilik. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 1365 KUHPerduta yang merugikan orang lain (si pemilik kendaraan) dan orang yang dirugikan berhak menuntut untuk menggati kerugian. Serta perjanjian yang dibuatnya tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar pasal 1320 KUHPerduta. Perlindungan hukum bagi pemilik benda berdasarkan Pasal 570 KUHPerduta pemilik benda diberi kewenangan untuk menguasai benda dalam tangan siapapun benda itu berada, dan setiap orang harus menghormatinya. Serta lembaga pembiayaan konsumen dalam memberikan kredit harus hati-hati untuk menilai faktor agunan dari segi yuridis formil dan materil.

ABSTRACT

With guarantees in credit transactions between creditors and debtors, a guarantee institution is needed. One of the collateral institutions that are often used in movable objects is the fiduciary guarantee institution. Fiduciary guarantees are regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Fiduciary is a process of transferring ownership of an object based on trust. The problem that will be discussed in this thesis is how the legal consequences of the BPKB guarantee to the Consumer Financing Institution without the owner's knowledge being connected to Book III of the Civil Law? as well as how the legal protection of the owner of the right to objects as a result of unlawful fiduciary guarantees?

This study uses a normative juridical approach, which uses secondary data sources, namely legislation, legal theories, and the opinions of scholars. The specification of this research is analytical descriptive, which describes facts in the form of secondary data (existing data) consisting of primary legal material (legislation), secondary legal material (doctrine), and tertiary legal material (public opinion). The research phase used in this study is to use the literature research stage. Data collection techniques are done through library research to collect primary and secondary data.

The results of the study concluded that creditors and debtors entered into an agreement to perform fiduciary guarantees by guaranteeing other people's vehicles without the owner's knowledge and permission. The act violates Article 1365 of the Civil Law which is detrimental to another person (the owner of the vehicle) and the injured person has the right to kneel to replace the loss. And the agreement he made was considered invalid and null and void because it violated Article 1320 of the Civil Law. Legal protection for the owner of the object based on Article 570 of the Civil Law of the owner of the object is given the authority to control the object in the hand of whoever the object is, and everyone must respect it. As well as consumer financing institutions in providing credit must be careful to assess collateral factors in terms of formal and material juridical.